

Kekerasan Simbolik Berita Kriminal di Media Massa

Chazizah Gusnita, S.Sos, M.Krim
Pengajar Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur
Chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

Abstract

Violence is not only done physically but can also be symbolic. Symbolic violence is the meaning, logic and beliefs that are biased but subtly and vaguely imposed on the other as true. Symbolic violence is based on a long-established and socially long-standing social expectations and beliefs. Coercion is done smoothly and vaguely so that the public does not realize and feel it as coercion. By hiding the violence, it is hoped that the symbolic violence can be accepted by the audience as something reasonable. Symbolic violence by the media in the form of language, symbols, text, images, and other mass media attributes. Mass media is able to form labeling, stigma, new discourse in society by doing such symbolic violence. The worst thing is that perpetrators and victims of symbolic violence are not aware of the spread of this "crime". Finally, symbolic violence is perpetuated in society and is even considered to be legitimate.

Keywords: *violence crime, symbolic violence, power, mass media*

Pendahuluan

Berbicara tentang kejahatan kekerasan, secara awam masyarakat tentu langsung membayangkan yang namanya kekerasan secara fisik. Kejahatan kekerasan identik dengan kekerasan secara fisik, apalagi secara hukum dan perundang-undangan di Indonesia, kejahatan kekerasan sudah diatur. Seseorang yang melakukan kejahatan kekerasan akan ditindak sesuai perbuatannya. Mulai dari kekerasan penganiayaan ringan maupun berat.

Kekerasan dapat dirumuskan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau dirumuskan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita perlukaan fisik, dan kematian. Tindakan kekerasan dapat terjadi dalam situasi yang sangat khusus, misalnya karena gelap mata melakukan tindakan yang mengakibatkan matinya orang lain (Mustofa, 2010).

Teori kekerasan *Anomie* dicetuskan oleh Robert K Merton pada tahun 1968. Menurut Merton, dalam masyarakat terdapat dua jenis norma sosial yaitu tujuan sosial dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) (Darma Weda, 1996). Permasalahan muncul didalam menggunakan sarana-sarana tersebut, dimana tidak semua orang dapat menggunakan sarana yang tersedia. Keadaan tersebut seperti tidak meratanya sarana-sarana serta perbedaan struktur kesempatan, akan menimbulkan frustrasi dikalangan orang/kelompok yang tidak mempunyai kesempatan pada tujuan tersebut. Dengan demikian, akan muncul konflik. Kondisi inilah yang menimbulkan perilaku deviasi atau kejahatan yang disebut kondisi *anomie*.

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik ialah tindakan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain (Hendrarti, 2008). Kekerasan fisik menyebabkan korban yang babak belur atau harta yang sudah lenyap dijajah.

- 1) Pembunuhan adalah setiap pembunuhan orang lain oleh tindakan orang itu sendiri.
- 2) Serangan dengan memukul (*assault*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi kekerasan actual fisik kepada orang lain.
- 3) *Forcible rape* (pemerksaan dengan paksaan) ialah tindakan hubungan seksual dimana salah satu *partner* menggunakan

beberapa bentuk kekerasan agar partner lainnya menyerah.

- 4) Menyiksa ialah menghukum dengan menyengsarakan (menyakiti, menganiaya, dsb.).
- 5) Sadisme ialah kekejaman, kebuasan, dan kekasaran.
- 6) Melukai ialah membuat luka pada atau menyakiti hati.
- 7) Menangkap ialah memegang (binatang, pencuri, penjahat, dsb.).
- 8) Mengurung ialah membiarkan ada didalam saja.

b) Kekerasan Simbolik

Kekerasan simbolik ialah tindakan yang memanfaatkan berbagai sarana (media) untuk menyakiti hati dan merugikan kepentingan orang lain. Akibat dari kekerasan simbolik memang tidak langsung mengenai fisik korban namun sangat menyakiti hati dan berlangsung sangat lama, bahkan beberapa dekade.

Dalam penelitian ini lebih fokus pada kekerasan simbolik yang dilakukan media massa. Media adalah objek atau alat komunikasi yang seharusnya bersifat netral (Haryatmoko, 2007). Artinya, media massa menyajikan berita yang bersifat objektif dan faktual. Dalam praktiknya, suatu berita cenderung tidak objektif sejak awal (Makarim, 2002). Berita cenderung tidak bebas dari kepentingan di luar pemberitaan. Akibatnya, isi berita belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (Piliang, 2001). Sering kali yang disampaikan oleh media massa itu sebuah pendapat, pandangan, praduga, bukan fakta. Karena

disampaikan berulang-ulang dan dikemas secara halus, pembaca cenderung menerimanya sebagai informasi yang benar. Dalam kondisi ini, media massa telah melakukan kekerasan simbolik kepada khalayak (Roechan, 2010).

Menurut Bourdieu (1994), kekerasan simbolik adalah kekuasaan yang dapat dikendali dari tujuannya untuk mendapatkan pengakuan. Artinya, kekuasaan (baik ekonomi, politik, budaya, atau lainnya) yang memiliki kemampuan untuk tidak dapat dikenali bentuk aslinya, kekerasannya, atau kesewenang-wenangannya. Kekerasan simbolik bekerja dengan mekanisme penyembunyian kekerasan yang dimiliki dan menjadi sesuatu yang diterima sebagai “yang memang seharusnya demikian”. “Yang” menurut Bourdieu itu adalah *doxa*. Keberadaan *doxa* diperoleh melalui proses penamaan yang berlangsung terus menerus. Pelaku sosial pun menerima kekerasan simbolik sebagai sesuatu yang wajar karena kekerasan simbolik menggunakan struktur objektif yang ada di dalam dunia sosial (Rusdiarti, 2003: 39).

Saat media melakukan konstruksi terhadap realitas, maka hal ini sudah disebut kekerasan simbolik. Di balik ini, media menyembunyikan kekerasannya melalui simbol-simbol bahasa. Simbol bahasa ini pun menjadi sesuatu hal atau budaya yang diterima oleh pembaca atau masyarakat. Sehingga, masyarakat sendiri atau korban pemerkosaan tersebut tidak sadar kalau media telah melakukan kekerasan secara simbolik.

Kekerasan simbolik adalah makna, logika dan keyakinan yang mengandung bias tetapi secara halus dan samar dipaksakan kepada pihak lain sebagai sesuatu yang benar (Bourdieu, 1994; Fashri, 2007). Kekerasan simbolik didasarkan pada rasa percaya, loyalitas, kesediaan untuk menerima, hutang budi, dan lain-lain (Thomson, 2007:96). Kekerasan simbolik didasarkan pada harapan dan kepercayaan publik yang sudah terbentuk dan tertanam lama secara sosial (Bourdieu, 1994). Pemaksaan tersebut dilakukan secara halus dan samar sehingga publik tidak menyadari dan merasakannya sebagai paksaan (Rusdiarti, 2003; Fashri, 2007).

Dengan menyembunyikan kekerasannya, diharapkan kekerasan simbolik tersebut bisa diterima oleh khalayak sebagai sesuatu yang wajar, sebagai wacana yang dominan atau *doxa* (Bourdieu, 1994; Rusdiarti, 2003; Fashri, 2007; Piliang, 2001; dan Foucault, 1971). Kekerasan simbolik merupakan praktik dominasi melalui komunikasi (periksa Thomson, 1984; Foucault, 1971). Wacana yang kalah dipinggirkan dan tidak diakui oleh publik.

Kekerasan simbolik adalah kekerasan wacana (*discourse*) yang lebih merupakan aktivitas intelektual untuk mengkondisikan olah pikir pihak lain sehingga berbagai bentuk kekerasan menjadi sah dan bahkan diperlukan. Karena bekerja pada level olah pikir, korban tidak merasa mengalami kekerasan sehingga kekerasan fisik

maupun psikologis menjadi sah dan diterima sukarela (Marsana, 2000: 15). Manakala konstruksi realitas media berbeda dengan realitas yang ada di masyarakat, maka hakikatnya telah terjadi kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik bisa mewujudkan melalui penggunaan bahasa penghalusan, pengaburan, atau bahkan pengasaran fakta. Kekerasan simbolik tidak hanya beroperasi lewat bahasa. Namun juga terjadi pada isi bahasa (*language content*) itu sendiri yakni pada apa yang diucapkan, disampaikan atau diekspresikan (Sobur, 2009: 89).

Penulis menilai media sebagai suatu institusi pemegang modal dan kekuasaan. Dengan modal dan kekuasaan tersebut, media mampu melakukan konstruksi realitas sosial secara terus menerus. Media sebagai habitus melakukan kekerasan simbolik melalui bahasa. Pembaca media tidak sadar telah menjadi korban, begitu juga korban perkosaan yang diberitakan media. Media pun sebagai pelaku juga tidak menyadari bahwa telah melakukan habitus berupa bahasa yang mengarah pada kekerasan simbolik.

Bourdieu (1994) memandang kekerasan simbolik adalah kekuasaan yang dapat dikendali dari tujuannya untuk mendapatkan pengakuan. Artinya, kekuasaan (baik ekonomi, politik, budaya, atau lainnya) yang memiliki kemampuan untuk tidak dapat dikenali bentuk aslinya, kekerasannya, atau kesewenang-wenangannya. Kekerasan simbolik bekerja dengan mekanisme penyembunian kekerasan yang

dimiliki dan menjadi sesuatu yang diterima sebagai “yang memang seharusnya demikian”. Pelaku sosial pun menerima kekerasan simbolik sebagai sesuatu yang wajar karena kekerasan simbolik menggunakan struktur objektif yang ada di dalam dunia sosial (Rusdiarti, 2003: 39).

Bekerjanya media pada hakekatnya adalah sebuah proses konstruksi realitas. Isi media lebih menggambarkan hasil kerja aktor media yang lebih memilih memberitakan sesuatu dari pada sesuatu yang lain. Disebabkan oleh sifat dan fakta bahwa pekerjaan media massa tersebut, maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*). Pembuatan berita di media pada dasarnya tidak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah “cerita” (Sobur, 2009: 88). Menurut Ferdinand de Saussure, persepsi dan pandangan kita tentang realitas, dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial. Dari sini berarti, tanda membentuk persepsi manusia, lebih dari sekedar merefleksikan realitas yang ada (Listiorini, 1999: 257).

Melihat dari teori realitas konstruksi media tersebut, media sangat memainkan peranannya dalam membentuk realitas. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan kata-kata, bahasa yang membentuk makna tersendiri di masyarakat. Bahkan konstruksi media dalam penggunaan bahasa terkadang berbeda-beda di satu media dengan

media lain. Hal itu pun dipengaruhi oleh berbagai kepentingan.

Dalam kriminologi, pemberitaan media massa tentang kejahatan dapat dilihat pada aspek konstruksi yang dibangun oleh media itu sendiri. Philip Schlesinger (1991) dalam penelitiannya berjudul *The Media Politic of Crime and Criminal Justice* menjelaskan bagaimana penanganan kejahatan dan penegakan keadilan diberitakan oleh media nasional di Inggris. Artikel ini mempelajari hubungan antara sumber berita dan media yang cenderung mengabaikan konflik di antara lembaga-lembaga sosial. Artikel ini juga memberikan perhatian adanya hubungan antara konsumsi pola media dan kekuatan atas kejahatan pada penonton televisi. Selain itu, disimpulkan bahwa ada hubungan antara sosiologi media, ilmu politik dan kriminologi (Schelesinger, 1991: 397).

Kekuasaan media dalam mewacanakan sebuah peristiwa dapat mengubah realitas sosial, melalui bahasa dalam pemberitaan. Lewat narasinya, media massa menciptakan definisi-definisi tertentu mengenai kehidupan manusia dan kejahatan yang dilakukan seseorang. Media massa mengkonstruksi siapa pahlawan dan siapa penjahat (Muslich: 2008:154).

Dalam mendefenisikan sebuah kejahatan, termasuk kejahatan terhadap perempuan yang diberitakan, masing-masing media massa mempunyai konstruksiyang berbeda. Berita tentang kejahatan bervariasi tergantung pada

jenis media tersebut. Misalnya untuk radio akan berbeda peliputannya dengan televisi atau media cetak (Robert Reiner, 2000: 310). Setiap kegiatan jurnalistik selalui diatur dalam sebuah kode etik. Dalam kode etik jurnalistik versi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), terdapat 21 etika yang harus dijalankan setiap jurnalis (<http://ajijakarta.org>).

Bahkan kegiatan jurnalistik pun diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana ada 21 pasal yang wajib diikuti para jurnalis. Oleh karenanya, seorang wartawan telah mempunyai aturan dan pedoman dalam memuat sebuah berita yang layak. Baik menurut etika jurnalistik maupun undang-undang yang telah ditetapkan. Bahkan di tahun 2014 ini, sejumlah wartawan mempunyai ujian sertifikasi layaknya seorang pengajar. Meski terdapat banyak pedoman dalam pemberitaan para jurnalistik, tidak dapat dipungkiri bahwa media massa sendiri punya banyak kepentingan dengan kekuasaan yang mereka miliki (<http://www.pwi.or.id/>, 2014).

Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam (Sobur, 2001: 29). Menurut Berger dan Luckmann, asumsi dasarnya pada “realitas adalah kontruksi sosial”. Bahwa kontruksi sosial memiliki beberapa kekuatan yakni adanya peran sentral bahasa yang memberikan mekanisme konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kemudian kontruksi sosial

dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal. Hal ini tidak mengasumsikan keseragaman. Serta bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu. Dari penjelasan Berger dan Luckman tersebut, penulis melihat dalam membuat sebuah berita, media cenderung melakukan konstruksi. Konstruksi yang dilakukan yakni melalui bahasa. Konstruksi ini pun semakin menambah kompleksitas permasalahan kasus pemerkosaan di masyarakat dimana budaya patriarki sudah tertanam (Ericson, Baranek, dan Chan, 1991:239).

Pada akhir pemberitaan, berita kejahatan yang dibangun menjadi realitas sosial yang dalam kenyataan merupakan suatu realitas subjektif yang dibangun secara sosial. Eriyanto turut menjelaskan bahwa media juga melakukan marjinalisasi terhadap perempuan. Dalam hal ini, terjadi penggambaran yang buruk terhadap perempuan di media massa. Ada beberapa praktek pemakaian bahasa yang menjadi wacana marjinalisasi. Salah satunya adalah penghalusan makna (eufemisme). Masalah muncul ketika penggunaan eufemisme ini menandai dan menamai suatu realitas. Masalah yang terjadi karena realitas itu buruk yang memalukan seperti kejahatan seksual (Eriyanto, 2001:124).

Permasalahan

Media massa merupakan wadah untuk mentransformasi ide dan pengetahuan. Media massa pun diharapkan dapat

menampilkan berita-berita dan informasi yang netral, akurat, dan berkelanjutan. Namun berita-berita media massa mengandung unsur-unsur ekonomi, politik, budaya yang mempengaruhi isi berita yang akan disampaikan kepada khalayak. Khususnya untuk berita-berita kriminal. Namun, pemberitaan-pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik seringkali membentuk aksentuasi yang diskriminatif terhadap korban kejahatan. Aksentuasi diskriminatif tersebut dapat dilihat tata bahasa maupun visual gambar. Bentuk-bentuk stereotipe yang dimunculkan oleh media massa merupakan bentuk kekerasan simbolik (Ngangi, 2011:3).

Secara luas, bagaimana kekuatan media pada kenyataannya mempunyai keistimewaan dalam memusatkan kekuatan simbolik, bahwa media direproduksi mewakili gagasan pemerintah. Kekuatan simbolik berarti “kekuatan realitas konstruktif” media dalam pengertian umum. Masing-masing program, baik teks ataupun gambar tentunya dipercaya sebagai suatu fakta-fakta. Kekuatan media dimana fokus dari institusi media adalah kekuatan simbolik suatu “realitas konstruktif” yang ini semua merupakan suatu proses sosial (Couldry, 2000:3-4).

Bentuk konstruksi media massa dilakukan dengan berbagai cara. Banyak informasi dalam suatu teks tidak dinyatakan secara eksplisit tapi implisit. Ada berbagai tujuan yang ingin diraih dalam konstruksi ini. Salah satunya ialah untuk keuntungan semata (bisnis) dan bisa juga keberpihakan (Eriyanto:

2009:5). Menurut Peter D. Moss (1999), wacana media massa merupakan konstruk kultural yang dihasilkan oleh ideologi. Karena itu, berita dalam media massa menggunakan *frame* atau kerangka tertentu untuk memahami realitas sosial.

Roger Fowler (1991) mengatakan bahwa berita itu merupakan bentuk konstruksi. Sebuah kejadian yang dilaporkan oleh jurnalis bukanlah gambaran sebuah kejadian, melainkan adanya proses seleksi dalam pemberitaan (Fowler, 1991:2). Cara media melaporkan berita tentang penyimpangan memberikan pengaruh yang besar pada reaksi sosial masyarakat kepada kelompok-kelompok tertentu. Keyakinan umum kemudian menyebar di media massa (Marsch, 2011:4).

Pemberitaan media tentang kejahatan cenderung bersifat sensasional, tanpa pernah memperhitungkan dampak terhadap seseorang yang diberitakan. Pemberitaan terkait kejahatan juga kerap terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik yang seharusnya menjadi panutan para jurnalis. Berita yang ditampilkan hanya satu sisi alias tidak berimbang, dan tidak melakukan proses cek dan ricek (Eriyanto, 2003:117).

Analisa

Media mampu melakukan kontruksi realitas sosial. Dengan begitu, media mempunyai kekuasaan yang tinggi dalam membentuk kontruksi di masyarakat. Dalam hal ini kontruksi

masyarakat dari sebuah berita kejahatan. Media mampu menggiring pembacanya melalui bahasa, teks, gambar, dan atribut lain yang digunakan media dalam penyebarluasan informasi. Atribut-atribut tersebut bebas digunakan meski media mempunyai kode etik dalam penggunaannya dan pengaturan atribut media tersebut. Namun dengan penggunaan atribut tersebut yakni bahasa, teks, gambar, video, media mampu melakukan suatu kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik inilah yang tidak bisa dilihat secara kasat mata menjadi sebuah suatu kejahatan.

Secara nyata, kekerasan simbolik dapat dilihat dalam bentuk atribut media tadi (bahasa, teks, gambar, dan video). Namun penggunaan atribut tersebut mampu menggiring kontruksi realitas berita kejahatan. Sehingga pembaca tidak sadar jika berita tersebut dapat menggiring wacana yang dilakukan oleh media. Salah satu contoh kontruksi yang dilakukan media massa dalam pemberitaan kasus pemerkosaan. Media mampu menggiring pembaca jika korban pemerkosaan juga punya andil dalam kasus kejahatan yang terjadi pada diri korban itu sendiri. Melalui bahasa, media melakukan penggunaan teks yang mengarah pada korban yang mau dibawa pelaku ke sebuah hotel hingga terjadilah kasus pemerkosaan. Dari teks-teks inilah, media akhirnya menggiring pembaca hingga membentuk *labelling* atau stigma terhadap korban kejahatan.

Media pun sebagai pembawa dan penyebar budaya yang ada di masyarakat itu melalui teks. Budaya

adalah kesewenang-wenangan dalam dua pengertian yakni dalam pengenaan dan dalam isinya. Gagasan kesewenang-wenangan ini menunjukkan di sini selain sebagai hasil dari empiris pelacakan sejarah, budaya tidak dapat disimpulkan atau berasal dari setiap gagasan dari kesesuaian atau nilai. Semua budaya memiliki kesewenang-wenangnya. Di balik semua budaya terletak sanksi sewenang-wenang 'kekuasaan *de facto* murni' Ini adalah apa yang dikatakan Bourdieu (1994) ketika ia berbicara tentang 'sewenang-wenang budaya'.

Apa yang dituliskan media, merupakan kekerasan simbolik dalam bentuk wacana (*discourse*), yang lebih merupakan aktivitas intelektual untuk mengkondisikan olah pikir pihak lain

sehingga berbagai bentuk kekerasan menjadi sah dan bahkan diperlukan. Karena bekerja pada level olah pikir, korban tidak merasa mengalami kekerasan sehingga kekerasan fisik maupun psikologis menjadi sah dan diterima sukarela. Hal itu juga yang dikatakan Bourdieu (1994) tentang tatanan sosial berjalan seperti mesin simbolis yang mengesahkan dominasi realitas metafisik. Ada tiga bentuk interaksi sosial yang dominan yang perlu dicermati agar mampu membawa perubahan itu, yaitu interaksi komunikasi, kekuasaan dan sanksi atau moralitas. Ketiga jenis interaksi dominan inilah yang dilakukan media melalui nara sumber dengan bahasa dan teks.

Kesimpulan

1. Karakteristik media massa hampir sama. Sehingga bagaimana mereka memproduksi sebuah berita juga tidak akan berbeda yakni sesuai pada prinsip jurnalistik 5W+1H. Di dalam memproduksi sebuah berita, media menggunakan prinsip jurnalistik tersebut namun dengan *angle* yang berbeda dalam memberitakan sebuah berita kejahatan.
2. Setiap media punya ciri dan karakter sendiri dalam memberitakan sebuah kejahatan atau realitas di masyarakat. Namun tidak dipungkiri, ciri dan karakter tersebut juga

berhadapan dengan kepentingan media masing-masing. Media massa mampu melakukan konstruksi realitas dalam suatu berita kejahatan sesuai dengan kepentingan pemegang saham media massa itu sendiri.

3. Berita di media massa mampu melakukan konstruksi terhadap korban kejahatan. Dengan kekuasaan dan dominasinya, media mampu memberikan *labelling*, stigma, dan *fear of crime* terhadap suatu berita kejahatan. Hal ini sudah menjadi kegiatan rutin yang biasa dilakukan media massa. Kebiasaan media ini dianggap sah tanpa disadari oleh pembaca. Inilah yang disebut

- sebagai habitus oleh Bourdieu (1994).
4. Penggunaan kata-kata, kalimat, bahasa, sering menggunakan opini. Penulis media *online* bermain dengan konsep budaya masyarakat terhadap berita kejahatan. Seperti dalam berita kejahatan pemerkosaan, perempuan dalam kasus pemerkosaan adalah seorang yang lemah, tidak berdaya melawan, sementara pelaku adalah kuat. Opini-opini penulis dalam bentuk teks akan menambah penggunaan kekerasan simbolik.
 5. Ketika terjadi media melakukan suatu konstruksi realitas di masyarakat terhadap suatu kejahatan hingga menimbulkan kekerasan simbolik, maka sesungguhnya timbul kejahatan baru. Namun kejahatan yang berbau simbolik ini justru tidak disadari oleh korbannya. Begitu juga pelaku itu sendiri. Karena kekerasan simbolik tersebut menjadi sesuatu yang dianggap sah dan benar di masyarakat.
 6. Saat konstruksi ini dilakukan media, maka telah terjadi habitus. Habitus yang terus menerus dilakukan itu akan dianggap sesuatu yang benar.

Daftar Pustaka

Buku

- Bourdieu, Pierre, (1995), *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge: University Press
- Bourdieu, Pierre. (1991). *Language and Symbolic Power*. USA: Harvard University
- Bourdieu, Pierre. (1998). *Practical Reason*. California: Stanford University Press
- Ericson, Richard, Baranek, Patricia and Chan, Janet. (1991). *Representing Order: Crime, Law, and justice in the News Media*. Toronto: University of Toronto Press
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang
- Eriyanto, 2005. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Foucault, Michel. 1971. *Kritik Wacana Bahasa*. Terjemahan Inyik Ridwan Muzir. 2003. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Foucault, Michel, (2012), *The Social Reality of Truth*, Netherlands: Faculty of Humanities Department of Philosophy Tilburg

- Foucault, Michel. (1980). *Power Knowledge*. New York: Pantheon Books
- Foucault, Michel. (1978). *The History of Sexuality*. New York: Pantheon Books
- Haryatmoko. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: PT Gramedia
- Haryatmoko. 2007. Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi. Yogyakarta: Kanisius. Makarim, Edmon. 2002. Krisis Media dalam Perspektif Konvergensi Telematika: Wacana Media untuk Penyempurnaan UU Pers, (Online), <http://www.duniaesai.com/antro/antro2.htm>, diakses tanggal 07-03-2007).
- Muslich, Masnur, *Kekuasaan Media Massa Mengonstruksi Realitas*, Jurnal Bahasa dan Seni. Tahun 36, Nomor 2, Agustus, Universitas Negeri Malang, 2008
- Mustofa, Muhammad, *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, Depok, 2010
- Piliang, Yasraf Amir. 2001. Hiper-Realitas Media dan Kebudayaan: Kebenaran dalam Kegagalan Informasi, (Online), (<http://www.forum-rektor.org/artikel.php?hal=4&no=10>, diakses tanggal 07-02-2007).
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Roger Fowler dalam Sara Mills. (2004). *Discourse*. London: Routledge
- Rusdiarti, Suma Riella. 2003. Bahasa, Pertarungan Simbolik, dan Kekuasaan. Basis VII(11—12):31—40
- Shaw, D. L., and M. E. McCombs (eds.) (1977). *The Emergence of American Political Issues: The Agenda-Setting Function of the Press*. St. Paul: West Publishing Company
- Sobur, A. (2012). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Voumvakis, S. E. (1984). *News Accounts of attacks on women: A comparison of three toronto newspaper*. Toronto: University of Toronto.

Website

<http://www.ajijakarta.org/>

Undang-Undang

UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Jurnal

Bourdieu, Pierre, *Social Space and Symbolic, Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1 (Spring, 1989), pp.14-25

Chouliaraki, Lilie, *The symbolic power of transnational media: Managing the visibility of suffering*, Vol. 4, No. 329, 2008

Couldry, Nick. *Media Meta-Capital: Extending the Range of Bourdieu's Field*. Vol. 32, No. 5/6, Special Issue on The Sociology of Symbolic Power: A Special Issue in Memory of Pierre Bourdieu (Dec, 2003), pp. 653-677.

